



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Nipah Panjang, 18 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kawal, 06 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer (Penjaga Sekolah), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah membaca laporan Mediator perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 11 Februari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 014/03/II/2008, tanggal 11 Februari 2008;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan di rumah dinas selama 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. xxxx, lahir di Kawal pada tanggal 26 November 2008, Pendidikan Pelajar (SLTA);

4.2. xxxx, lahir di Kawal pada tanggal 16 Juni 2012, Pendidikan Pelajar (SD);

4.3. xxxx, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 07 April 2013, Pendidikan Pelajar (SD);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika memberikan nafkah pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai tukang masak di rumah makan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Tergugat perhitungan kepada Penggugat dan anak-anak mengenai keuangan, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5.3. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol namun Tergugat tidak pernah berubah;

5.4. Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan bermain judi, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat hingga Penggugat merasa lelah dengan sikap Tergugat;

5.5. Ketika terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat keluar dari rumah serta mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti *"anjing, babi, perempuan sial dan perempuan pembawa malapetaka"*;

5.6. Ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terkadang Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa memukul bagian belakang kepala Penggugat menggunakan gagang sapu hingga Penggugat hampir pingsan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Oktober 2024, saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk menjemput anak-anak pulang mengaji, setelah menjemput anak, Penggugat mampir ke rumah tante Penggugat untuk beristirahat namun setelah itu Tergugat datang menyusul ke rumah bibi Penggugat dan marah-marah, kemudian meminta Penggugat untuk pulang ke rumah membawa anak-anak, setelah sampai di rumah Tergugat kembali marah kepada Penggugat sambil mengatakan kata-kata kasar yang membuat Penggugat merasa sakit hati, setelah itu Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah,

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) hari hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Irsam bin H. Ismail) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang bernama (Fakhrurrazi, S.Ag.) dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 7 November 2024;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, 7 November 2024, yang menyatakan bahwa Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri,

Bahwa Penggugat dan mengakui dan menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator tertanggal 7 November 2024, yang menyatakan bahwa Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri,

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI.(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka oleh

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh **Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yulismar** dan **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marwiyah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yulismar**

**Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marwiyah, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI